

Analisis Sosial-Budaya Pengembangan Padi di Merauke

Adi Widjono¹

Ringkasan

Merauke mempunyai potensi alam dan ekonomi amat besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra produksi beras nasional. Tetapi karena padi bukan komoditas asli Merauke, pengembangan itu menghadapi risiko sosial budaya. Budaya asli Papua, termasuk Merauke, sangat kompleks, masih sangat kuat, dan umumnya kurang difahami para pembuat kebijakan dan penduduk pendatang. Saat ini masyarakat asli Papua tertarik untuk ikut membudidayakan padi, mungkin disebabkan karena padi tidak terikat oleh adat dan secara ekonomis lebih menguntungkan daripada komoditas tradisional. Tetapi, dalam jangka panjang, pengabaian komoditas tradisional mungkin akan dipersepsikan sebagai perusakan identitas budaya asli. Hal itu dapat menimbulkan beban psikis budaya pada masyarakat asli dan beban politik nasional pada pemerintah. Pengembangan komoditas tradisional bersama dengan padi akan memperkuat diversifikasi pangan dan daya saing pertanian Merauke. Padi layak dikembangkan secara optimal di Merauke dengan memperhatikan budaya asli. Berbagai komoditas tradisional dan komoditas berpotensi lain perlu ikut dikembangkan secara seimbang. Untuk pengembangan daya saing masyarakat asli, mendatangkan tenaga terampil dari luar Merauke untuk sementara sebaiknya dihindarkan. Sistem penyuluhan yang besar, sistematis, dan terencana diperlukan terutama untuk kulturasi masyarakat asli pada budidaya padi. Penyuluhan harus berfungsi sebagai jembatan informasi dua-arah, sebagai katalisator kesaling-mengertian antara masyarakat tani dan, khususnya, pemerintah. Sejumlah besar penyuluh bermutu tinggi akan diperlukan. Di samping untuk meningkatkan produktivitas petani padi yang telah ada, penyuluhan harus mampu menyadarkan dan memberdayakan masyarakat asli. Di fihak lain, sosialisasi kepada masyarakat pendatang diperlukan untuk lebih memahami dan menghargai budaya asli. Berbagai sektor dan subsektor harus dikembangkan secara simultan, seperti sarana transportasi, sistem tata niaga, industri pasca panen, dsb.

¹ Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor
adiwidjono@cbn.net.id; adiwidjono@yahoo.com; 08128574451

Potensi Padi Merauke

Secara internal, saat ini Kabupaten Merauke tidak mempunyai masalah pangan. Empat pangan utama penduduknya adalah padi, sagu (*Metroxylon sagu*), gembili (*Dioscorea esculenta*), dan ubi jalar (*Ipomoea batatas*). Keempat komoditas itu diproduksi dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan domestiknya. Di sebagian kecil daerah, misalnya di Kimaam, konon sesekali terjadi gagal panen. Namun itu dapat diatasi dengan produksi pangan dari daerah-daerah lain di kabupaten yang sama.

Penduduk Merauke 175.000 jiwa (Kabupaten Merauke 2006). Dengan adanya sagu dan ubi-ubian sebagai pangan penting, rata-rata konsumsi beras mereka tentu di bawah rata-rata nasional yang 120 kg/kapita/tahun. Tetapi bila konsumsi itu sama dengan rata-rata nasional, yang diperlukan Merauke hanya sekitar setara 34.000 ton GKG (gabah kering giling)/tahun. Jumlah itu jauh dibawah produksi padi di Merauke yang di tahun 2004 sudah mencapai 64.800 ton GKG (Bappeda & BPS Merauke 2005).

Padi merupakan komoditas introduksi yang dibawa ke Merauke kurang dari satu abad yang lalu. Pemerintah kolonial Belanda pernah berupaya mengembangkan areal tanam padi yang amat luas di Kumbes. Saat ini padi diproduksi terutama oleh para transmigran dari Jawa. Sebagai pangan, padi telah disukai oleh hampir seluruh lapisan masyarakat Merauke.

Potensi pengembangan padi di Merauke didukung antara lain oleh sumber daya alam (terutama iklim, tanah, dan air) yang amat sesuai di sebagian besar lahan Kabupaten itu. Makarim *et al.* (2006) melaporkan bahwa Kabupaten Merauke mempunyai 1,7 juta ha lahan yang secara biofisik sesuai bagi pertanaman padi sawah. Yang sudah dibuka sekarang baru sekitar 21.300 ha dengan luas panen sekitar 15.700 ha (Kabupaten Merauke 2006).

Hasil GKG rata-rata saat ini di Merauke sekitar 4 ton/ha (Makarim *et al.* 2006). Bila tingkat hasil itu dapat ditingkatkan menjadi 6 ton/ha, dan luas panen sawah ditingkatkan menjadi 0,5 juta ha, maka produksi GKG Merauke per tahun dapat mencapai 3 juta ton. Belum termasuk produksi dari kabupaten-kabupaten lain di Papua, angka itu sudah melebihi kebutuhan Papua (termasuk Irijaab) dan Maluku di tahun 2010 yang diprediksi menjadi 686.000 ton GKG (Makarim *et al.* 2006). Saat ini Papua baru dapat memenuhi 30-40% dari kebutuhannya akan beras (Makarim *et al.* 2006).

Namun permintaan akan beras oleh daerah-daerah di luar Papua dan Maluku, termasuk Papua Nugini dan negara-negara lain, merupakan peluang pasar yang menjanjikan bagi pengembangan padi di Merauke. Peluang itu dapat semakin besar bila disertai pengembangan industri pascapanen padi. Ini selaras dengan visi pembangunan Papua yang dinyatakan untuk menjadi pusat pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia dan Pasifik (Howai 2004).

Kesimpulannya, di tengah berbagai masalah produksi beras di Indonesia yang belum terpecahkan, Merauke mempunyai potensi alam amat besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra produksi beras nasional. Hal itu tidak bertentangan dengan visi ketahanan pangan Papua yang berbasis sumber daya lokal, efisien, dan berkelanjutan menuju masyarakat Papua yang sejahtera (Muhamad 2002).

Pertanyaannya adalah: bagaimana dampak sosial budaya pengembangan Merauke sebagai sentra produksi padi di tengah suburnya budaya asli yang bukan padi?

Persepsi Tentang Pemerintah dan Pembangunan

Penduduk asli Papua umumnya memandang bahwa proses pembangunan mereka ditopang oleh tiga pilar, yakni adat, agama, dan pemerintah.

Sayangnya, kepercayaan penduduk asli pada pemerintah, satu dari tiga pilar itu, semakin menurun. Beberapa tulisan (misalnya Raweyai 2002, Giay 1996, Wospakrik 2002) mengindikasikan bahwa akar masalah pelunturan kepercayaan itu adalah *persepsi* penduduk asli Papua bahwa, dibandingkan dengan penduduk pendatang², mereka tidak diperlakukan adil oleh pemerintah, khususnya secara budaya. Ada hubungan searah antara sikap terhadap pendatang dan sikap terhadap pemerintah yang seakan lebih berfihak kepada pendatang.

Berbagai tulisan lain juga menekankan betapa pemerintah tidak peka terhadap aspirasi budaya penduduk asli yang sangat spesifik dan berbeda dengan aspirasi *mainstream* "budaya nasional". Sekalipun merupakan kesan subjektif yang tidak harus mencerminkan fakta, *persepsi* sangat mempengaruhi perilaku nyata, dan karenanya harus dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan pembangunan.

Kekurang-percayaan penduduk asli Merauke bahkan sudah mulai memasuki ranah agama. Semakin menyangsikan kesungguhan lembaga agama dalam membangun kemanusiaan, mereka curiga bahwa gereja pun telah

² "Pendatang" dalam hal ini adalah penduduk Merauke yang berasal dari luar Merauke/Papua, seperti transmigran dari Jawa, pedagang dari Sulawesi, dsb. Masyarakat asli Merauke biasa menyebut pendatang sebagai "pu anim". Istilah "pendatang" sering dihindarkan karena mengandung dikotomi yang dianggap tidak layak. Namun penghindaran itu tidak menghilangkan dikotomi faktual. Karena nya penulis memilih menggunakan istilah itu untuk mendeskripsikan kondisi faktual, tetapi sekaligus menyarankan agar istilah itu secara objektif dipandang bebas nilai, bebas dari konotasi negatif bahwa kelompok yang satu lebih unggul daripada kelompok yang lain.

dikendalikan oleh pemerintah dan tidak tulus dalam pemberdayaan masyarakat asli Papua³. Di sini, agama yang kurang mampu lebih menyejahterakan masyarakat asli di tengah modernitas⁴ bersama para pendatang, dianggap memihak pemerintah dan pendatang. Kepercayaan pada pendatang, pemerintah, dan lembaga agama seperti menyatu dalam satu paket.

Antipati pada kaum pendatang, pemerintah, dan agama diperkuat oleh kenyataan bahwa penduduk asli semakin menjadi minoritas (a.l. Solossa 2005). Di Kabupaten Merauke, jumlah penduduk asli hanya 35% dari total populasi yang 175.000 jiwa (Kabupaten Merauke 2006). Sebagian masyarakat asli bahkan secara berlebihan menengarai adanya upaya genosida sistematis⁵. Bagaimana pun itu merupakan persepsi nyata yang mencerminkan semakin gawatnya ketidakpercayaan masyarakat asli akan diperhatikannya kepentingan mereka dalam pembangunan nasional. Menurut Sirait (2005), kita tidak bisa berharap orang Papua loyal pada pemerintah bila pemerintah sendiri tidak sungguh-sungguh memperhatikan mereka⁶.

Dengan demikian, dua dari tiga pilar (agama dan pemerintah) yang semula diandalkan masyarakat asli makin melemah dan mengancam keberhasilan pembangunan Papua yang tentu berdampak pada pembangunan nasional.

Pembangunan ditujukan bagi perbaikan kesejahteraan seluruh anak bangsa, termasuk masyarakat asli, secara adil. Visi pembangunan Papua pun didasarkan atas prinsip kasih sayang, keadilan, kesejahteraan, kemandirian, dan demokrasi (Howai 2004).

Untuk keberhasilan pembangunan nasional di Merauke, persepsi masyarakat asli tentang pemerintah dan pendatang sangat mendesak untuk diperbaiki. Perbaikan kepercayaan itu antara lain melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang memperhatikan kepentingan masyarakat asli. Kebijakan pengembangan produksi padi di Merauke perlu secara adil juga memperhatikan kepentingan masyarakat asli.

Dengan asumsi tidak ada masalah yang berarti dengan persepsi para pendatang, pembahasan tentang kebijakan pembangunan di Papua, dalam hal ini khususnya Merauke, lebih dikaitkan dengan persepsi masyarakat asli.

³ Sentimen semacam itu banyak diungkapkan oleh masyarakat asli Papua dalam media online misalnya:

http://www.westpapua.net/news/04/05/180504-upaya_serius_kaum_katolik_non_papua_di_lingkunga-5194.html

http://www.melanesianews.org/spm/publish/article_913.shtml

http://www.melanesianews.org/spm/publish/article_713.shtml

http://www.westpapua.net/news/04/06/200604-teror_terhadap_kaum_katolik_papua_maroke-5336.html

⁴ Modernitas adalah cara hidup baru yang lebih menyejahterakan daripada cara hidup sebelumnya.

⁵ Misalnya: http://www.melanesianews.org/kabar/publish/article_709.shtml

⁶ http://www.melanesianews.org/spm/publish/article_1571.shtml

Keseimbangan Persepsi Masyarakat Asli

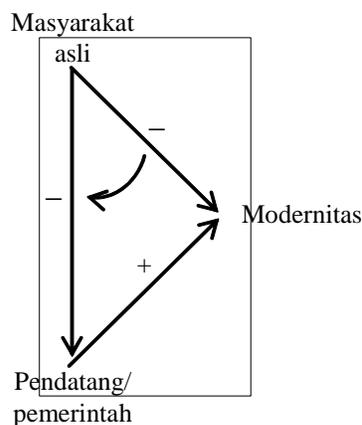
Perubahan lingkungan ekonomi dan budaya yang cepat telah memberikan dampak psikis yang sulit pada masyarakat asli pada umumnya. Itu berkenaan dengan persepsi mereka tentang tiga isu. *Pertama*, tentang **tradisi** yang harus dijaga karena telah menjamin kemakmuran banyak generasi sebelumnya. *Kedua*, tentang **modernitas**, kenyamanan yang mereka juga berhak atasnya. *Ketiga*, kepercayaan pada **pemerintah** yang juga dapat dikonotasikan sebagai kaum pendatang dan agama.

Dihubungkan dengan Teori Disonansi Kognitif (Festinger 1957), masyarakat asli selama ini gagal membuat ketiga persepsi itu (tentang tradisi, modernitas, dan pemerintah) selaras, konsisten.

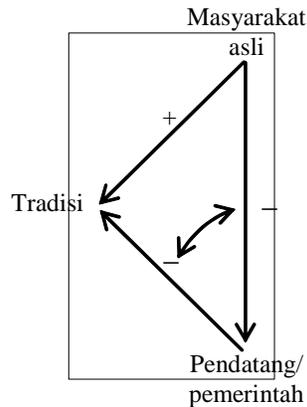
Persepsi subjek tentang dua isu dapat dipetakan dalam bentuk Segitiga Heider (Heider 1958 *dalam* Severin & Tankard 2001). Setiap sisi segitiga itu merepresentasikan persepsi subyek tentang isu ybs. atau persepsi subjek tentang keselarasan hubungan antara kedua isu. Tanda positif (+) menggambarkan simpati (sikap suka) atau hubungan selaras, sedangkan tanda negatif (-) menggambarkan antipati (sikap tak-suka) atau hubungan tak selaras.

Agar seimbang, ketiga sisi harus positif, atau salah satu positif dan dua negatif. Di luar dua kondisi itu, subjek, yang dalam hal ini masyarakat asli, akan merasakan inkonsistensi persepsi yang tidak nyaman secara psikis.

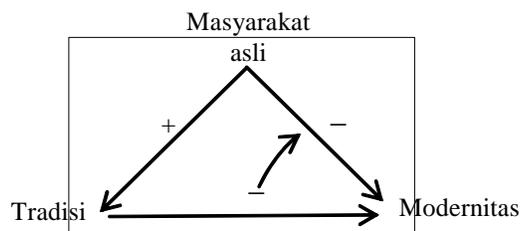
Bagi masyarakat asli, pemerintah/pendatang dipersepsikan selaras (+) dengan modernitas, sementara mereka sendiri secara nisbi belum mampu meraih modernitas itu (-) karena persaingan tak seimbang dengan para



Peta 1. Kekurang-mampuan meraih modernitas membuat masyarakat asli antipati pada pendatang/pemerintah saat ini.



Peta 2. Antipati masyarakat asli pada pendatang/pemerintah diteguhkan oleh persepsi bahwa tradisi mereka kurang dihargai.



Peta 3. Kekurang-mampuan masyarakat asli meraih modernitas disebabkan tradisi yang kurang selaras dengan modernitas.

pendatang. Persepsi mereka tentang pendatang, pesaing itu, serta pemerintah, bahkan agama, yang belum mampu memberdayakan mereka dalam persaingan, menjadi negatif (-), antipati (Peta 1). Antipati itu diteguhkan oleh persepsi bahwa pemerintah kurang menghargai budaya asli/tradisi (Peta 2).

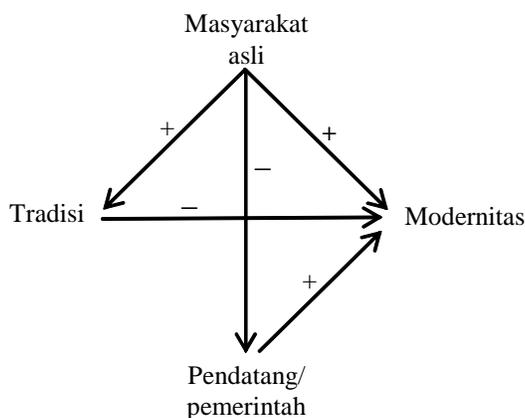
Tetapi bila ditelusuri, kurangnya kemampuan masyarakat asli bersaing dengan para pendatang tidak terlepas dari ikatan nilai-nilai budaya/tradisi/adat yang membatasi kemauan dan kemampuan mereka untuk bertindak seperti para pendatang. Setiap individu dibatasi oleh hambatan intrinsik (nilai-nilai pribadi) serta hambatan ekstrinsik (nilai-nilai kelompok). Hambatan intrinsik lebih mungkin kurang disadari dibanding hambatan ekstrinsik. Ikatan budaya yang sama tidak ada pada para pendatang.

Kekuatan tradisi/budayalah yang membatasi daya saing masyarakat asli untuk meraih modernitas. Tradisi masyarakat asli secara nisbi belum cukup selaras (-) dengan tuntutan modernitas (Peta 3) untuk bersaing dengan para pendatang.

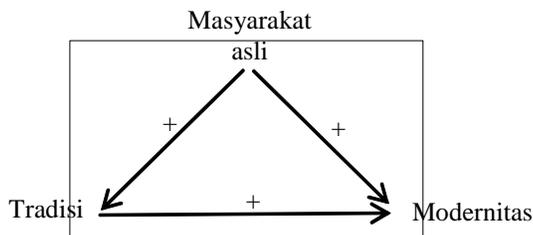
Sangat wajar bila penduduk asli merasa berhak atas modernitas. Artinya, persepsi mereka tentang modernitas seharusnya positif (+). Tetapi kondisi ideal tersebut saat ini tidak sesuai dengan kenyataan bahwa modernitas berada di luar jangkauan daya saing dan dapat menyalahi tradisi yang telah menghidupkan mereka melalui banyak generasi.

Ini merupakan ketidak-seimbangan psikis yang menyiksa, yang dalam istilah Festinger (1957) adalah disonansi kognitif. Ketidak-seimbangan itu dapat digambarkan dengan Segitiga Heider yang mempunyai satu persepsi negatif (-). Peta 4 memperlihatkan dua Segitiga Heider; keduanya mengandung persepsi positif (+) masyarakat asli atas modernitas, tetapi masing-masing membawa hanya satu hubungan negatif (-).

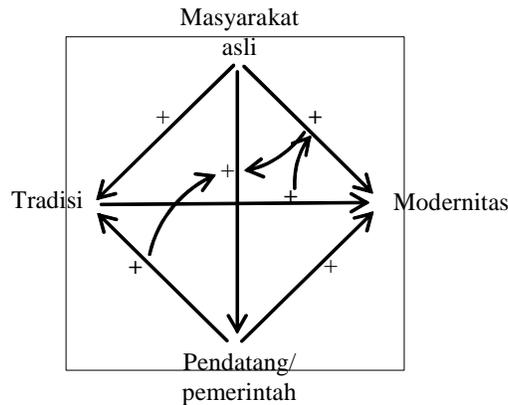
Secara teoritis, keseimbangan yang menyejahterakan masyarakat asli lebih mungkin tercapai bila pemerintah/pendatang ditiadakan dalam peta; sehingga modernitas dapat dicapai tanpa persaingan berat serta lebih mudah diselaraskan dengan tradisi (Peta 5).



Peta 4. Ketidak-seimbangan persepsi masyarakat asli tentang modernitas saat ini (hanya ada satu hubungan negatif dalam tiap segitiga).



Peta 5. Kondisi ideal persepsi masyarakat asli tentang tradisi dan modernitas.



Peta 6. Kondisi ideal persepsi masyarakat asli tentang tradisi, modernitas, dan pendatang/pemerintah.

Tetapi menghapus pemerintah/pendatang dalam kehidupan masyarakat asli Papua bukanlah sesuatu yang amat realistis. Sekali pun demikian, Peta 5 dapat dijadikan acuan bagi kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat asli mencapai modernitas. Bantuan itu dapat dilakukan melalui suatu upaya ganda: (1) **proteksi** dari persaingan dengan para pendatang dan (2) **penggeseran tradisi** ke arah yang lebih kondusif bagi modernitas.

Proteksi dapat dalam bentuk kebijakan pemerintah yang melindungi, dan lebih memberi kemudahan bagi, masyarakat asli selama beberapa tahun. Penggeseran tradisi, melalui penyadaran dan pemberdayaan, dapat secara bertahap mengatasi hambatan-hambatan intrinsik dan ekstrinsik setiap individu⁷. Kecepatan penyadaran dan pemberdayaan menentukan panjang masa proteksi. Masa proteksi itu memberi cukup waktu bagi masyarakat asli untuk menyiapkan diri bersaing secara sehat dengan saudara-saudaranya dari daerah lain, tetapi pun tidak terlalu lama dalam konteks pengembangan daya saing nasional di era global.

Kedua upaya itu perlu disempurnakan dengan perbaikan **penghargaan atas tradisi** masyarakat asli oleh pemerintah/pendatang (Peta 6). Kampanye, penerangan, dan bentuk-bentuk sosialisasi lain mungkin perlu terus menerus difasilitasi pemerintah bagi penduduk pendatang untuk lebih memahami dan menghargai budaya asli setempat.

Menarik untuk disimak bahwa menurut hasil penelitian Solossa (2005), penduduk pendatang di Papua mempunyai cukup empati pada masyarakat

⁷ Hambatan intrinsik dan ekstrinsik akan dibahas pada bagian selanjutnya dalam makalah ini.

Tabel 1. Nilai persetujuan responden tentang dua topik adat.

| Topik | Kelompok responden | Nilai persetujuan* |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Pentingnya masalah pelanggaran hak-hak masyarakat adat Papua atas SDA | Asli Papua | 3,3 |
| | Pendatang | 3,2 |
| Pentingnya musyawarah dengan masyarakat adat sebelum pemanfaatan lahan ulayat | Asli Papua | 3,6 |
| | Pendatang | 3,5 |

*Nilai antara 0 (sangat tidak setuju) hingga 4 (sangat setuju).

Data diolah kembali karena dalam laporan aslinya, jawaban “tidak tahu” diberi nilai 0 dan diolah, sementara seharusnya tidak diberi nilai dan tidak diolah.

Sumber: Solossa 2005

asli tentang dua topik adat (Tabel 1). Sekali pun penduduk pendatang masih kurang memahami sejumlah aspek lain dari budaya asli, hal itu setidaknya menggambarkan bahwa mereka mempunyai potensi untuk memahami dan menghormati budaya masyarakat asli.

Pemahaman dan penghargaan atas budaya masyarakat asli oleh pemerintah daerah kiranya cukup tinggi, mengingat Bupati Merauke saat ini adalah putra asli setempat. Masalah pemahaman akan budaya Papua justru lebih menonjol pada para pembuat kebijakan di tingkat pemerintah pusat, terutama mereka yang belum pernah mengunjungi Papua (Siahaan 2006).

Kesimpulannya, untuk memulihkan kepercayaan pada pemerintah/pendatang, kebijakan pembangunan di Papua/Merauke perlu mempertimbangkan tiga prinsip: (1) untuk sementara lebih memihak masyarakat asli mencapai modernitas, (2) meningkatkan keselarasan antara budaya asli dan modernitas, serta (3) mendorong pendatang untuk lebih memahami dan menghargai budaya asli.

Dikaitkan dengan pengembangan padi di Merauke, bila itu dilaksanakan, prinsip pertama menyarankan agar masyarakat asli diberdayakan tanpa, atau dengan sesedikit mungkin, persaingan dengan para pendatang. Bersama waktu, perbaikan keterampilan dan penyelarasan budaya asli pada modernitas akan meningkatkan daya saing masyarakat asli ke tingkat yang sebanding dengan para pendatang.

Budaya Pangan dan Sikap Atas Padi

Secara tradisional, sagu merupakan pangan utama mayoritas penduduk asli dan dihasilkan tanpa kekurangan, dengan hanya sedikit sentuhan teknologi

modern, di hampir seluruh wilayah Merauke. Kelimpahan sagu di wilayah ini sangat memengaruhi budaya penduduk aslinya. Salah satu nama marga dominan, *Mahuze*, dikaitkan dengan sagu sebagai totem. Komoditas ini bahkan dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan harus diperlakukan dengan rasa hormat sesuai adat. Pelanggaran adat ini dipercaya dapat menimbulkan konsekuensi buruk pada kehidupan manusia sehingga individu pelanggar dapat dikenai hukuman berat.

Gembili adalah pangan tradisional terpenting bagi masyarakat Kanum di sekitar Tenggara Merauke (misal: Wasur, Yanggandur, Sota). Lumbung, yang disebut *nai mo* atau *keter*, digunakan untuk menyimpan persediaan umbi gembili selama sepuluh bulan. Dinding dan atap lumbung itu terbuat dari kulit kayu bus (*Eucalyptus* sp.). Apabila persediaan umbi itu habis, sementara masa panennya belum tiba, mereka mengonsumsi sagu. Periode konsumsi sagu itu sekitar dua bulan. Seperti halnya sagu, gembili dianggap sebagai tumbuhan sakral yang harus diperlakukan dengan rasa hormat.

Ubi jalar dibudidayakan secara khas, terutama di daerah Kimaam. Ancaman genangan mendorong berkembangnya tradisi menanam ubi di gundukan-gundukan. Seperti halnya dengan teknologi tradisional sagu dan gembili, teknologi budidaya tradisional itu telah berumur sangat tua dan diturunkan dari generasi ke generasi.

Pengembangan padi di Merauke dapat secara budaya menyaingi komoditas-komoditas tradisional, terutama sagu, gembili, dan ubi jalar. Padi dapat meredupkan rasa hormat masyarakat asli pada komoditas-komoditas tradisional serta mengancam identitas budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Karena itu pengembangan padi perlu dilaksanakan secara terencana dengan mempertimbangkan aspek budaya agar tidak menimbulkan masalah sosial yang tidak perlu.

Pengamatan

Suatu pengamatan dilakukan dalam bulan Juni 2006 untuk memahami aspirasi budaya lokal yang beragam tentang pembangunan pertanian berbasis padi di Merauke. Wawancara dilakukan dengan responden dari suku Jawa (transmigran) di Distrik Tanah Miring, suku Asmat (asli Papua, luar Merauke) di Distrik Semangga, suku Marind⁸ (asli Merauke) di Distrik Semangga, dan suku Kanum (asli Merauke) di Distrik Sota. Keempat kelompok responden mempunyai karakter dan budaya pangan asli yang berbeda (Tabel 2).

Pertanyaan dasar yang diajukan kepada para responden adalah: "Bila pemerintah memberi anda bantuan untuk mengembangkan tanaman pangan, apakah anda memilih komoditas padi, sagu, gembili, ubi jalar, atau lainnya?"

⁸ Di beberapa tulisan lain juga disebut *Malind*.

Tabel 2. Kelompok responden. Merauke, Juni 2006.

| Suku | Distrik | Pangan tradisional | Keterangan |
|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Jawa (transmigran) | Tanah Miring | Padi | Transmigran, biasa menanam padi. |
| Asmat (asli Papua luar Merauke) | Semangga | Sagu | Tidak memiliki dusun sagu, sedang belajar menanam padi. |
| Marind (asli Merauke) | Semangga | Sagu | Memiliki dusun sagu, sedang belajar menanam padi. |
| Kanum (asli Merauke) | Sota | Gembili, sagu | Memiliki ladang gembili dan dusun sagu, belum pernah menanam padi. |

Wawancara lain untuk menggali informasi pendukung yang relevan dilakukan dengan beberapa pemuka adat dan tokoh masyarakat asli serta pejabat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Merauke.

Temuan

Kelompok responden pertama adalah masyarakat transmigran asal Jawa di Distrik Tanah Miring. Mereka mempunyai pangan tradisional utama padi, dan sudah biasa menggarap sawah. Maka mudah dimengerti, mereka memilih padi daripada tanaman pangan lain untuk dikembangkan.

Asmat merupakan wilayah pesisir di sebelah Barat Laut Merauke. Masyarakat kelompok responden kedua, berasal dari wilayah itu tetapi telah menjadi penduduk Distrik Semangga, Merauke. Mereka juga memperoleh bagian lahan usaha seperti layaknya transmigran lain, dan sedang belajar menanam padi sawah. Menurut petugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, hasilnya cukup bagus. Sekalipun pangan pokoknya adalah sagu, kelompok responden ini pun memilih padi sebagai komoditas pangan untuk dikembangkan. Pada awalnya justifikasi yang mungkin adalah karena, sebagai transmigran dari luar wilayah Merauke, mereka tidak memiliki dusun⁹ sagu.

Suku Marind adalah penduduk asli Merauke dengan budaya sagu yang kuat. Sagu adalah pangan tradisional utama mereka. Kelompok responden

⁹ *Dusun* dalam budaya Papua adalah bidang lahan yang ditumbuhi sagu (atau tumbuhan sumber kehidupan lain) dan dikuasai oleh sekelompok masyarakat (lihat: Malik *et al.* 2005)

ketiga dalam pengamatan ini adalah masyarakat Marind di Distrik Semangga. Mereka hidup dalam satu kampung dengan para transmigran dari Jawa; sebagiannya sedang belajar membudidayakan padi sawah di bawah bimbingan seorang yang berasal dari Jawa (Mudjihardjo). Kelompok responden ini pun memilih mengembangkan padi daripada sagu atau tanaman pangan lain. Sebagai masyarakat dengan budaya sagu dan masih memiliki dusun sagu yang cukup luas, pilihan itu pada awalnya terasa agak aneh bagi pengamat.

Kelompok responden keempat adalah masyarakat suku Kanum yang asli dan tinggal di Distrik Sota, di perbatasan Selatan Indonesia – Papua Nugini. Pangan pokok tradisional mereka adalah gembili. Teknik budidaya, termasuk sejumlah varietas, gembili dengan karakter yang berbeda, telah mereka kuasai secara turun-temurun. Alat olah tanah yang dipakai biasanya sekop. Untuk menghindarkan kerusakan tanaman karena musim hujan, gembili ditanam sekitar bulan Oktober.

Kelompok responden dengan pangan tradisional utama gembili ini belum pernah menanam padi. Bila ada bantuan pemerintah, dari pilihan-pilihan komoditas pangan untuk mereka kembangkan, mereka secara “mengejutkan” juga memilih padi.

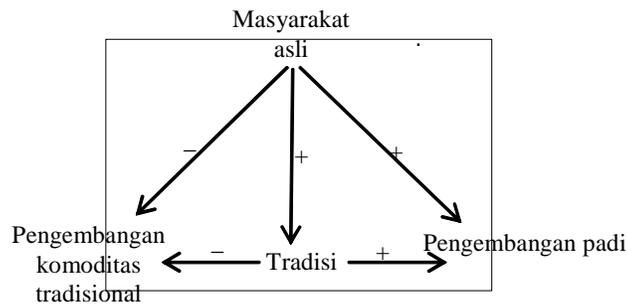
Kesimpulannya, tidak ada kelompok responden yang menunjukkan resistensi terhadap pengembangan padi. Masyarakat asli Merauke/Papua dengan budaya tradisional bukan-padi pun menyatakan ketertarikan pada budidaya padi.

Seorang pemuka adat, Y.B. Gebze, berpendapat bahwa waktu dan metode pengamatan ini terlalu sederhana untuk memperoleh tanggapan yang cukup jujur dan untuk menangkap esensi tanggapan responden. Dia sangat memungkinkan bahwa para responden penduduk asli sengaja memberikan informasi yang mereka duga dapat menyenangkan pengamat yang adalah pendedar sekaligus orang pemerintah pusat.

Tetapi analisis lain dapat ditawarkan untuk menjelaskan mengapa para responden asli Papua lebih tertarik mengembangkan padi daripada mengembangkan komoditas pangan tradisional.

Pertama, padi adalah pangan yang disukai oleh hampir seluruh lapisan masyarakat Merauke, bukan hanya pendatang, tetapi juga masyarakat asli, termasuk penduduk Papua Nugini yang dapat melintas batas negara untuk membeli beras dari Merauke. Tingkat kulturasi masyarakat asli Papua pada beras hingga saat ini lebih tinggi daripada kulturasi masyarakat pendatang pada pangan tradisional Papua.

Kedua, sagu, gembili, ubi jalar, atau tanaman pangan tradisional lain saat ini mempunyai nilai ekonomi jauh di bawah padi. Pangan tradisional digunakan lebih pada situasi subsisten. Dengan kebutuhan ekonomis yang semakin jauh melampaui kebutuhan subsisten, padi merupakan pilihan yang lebih baik daripada komoditas pangan tradisional untuk dikembangkan.



Peta 7. Persepsi seimbang masyarakat asli tentang pengembangan komoditas tradisional dan pengembangan padi dalam kaitan dengan tradisi.

Ketiga, secara adat, komoditas tradisional, khususnya sagu, tidak dapat diperlakukan secara modern. Mempertukarkan komoditas tradisional untuk alasan ekonomis (seperti barter dan jual) juga cenderung ditabukan. Padi, sebagai komoditas introduksi, tidak terikat oleh nilai-nilai adat, sehingga dapat diperlakukan dengan bebas (Peta 7).

Pengamatan ini mungkin memang terlalu singkat untuk memberi kesimpulan yang sangat meyakinkan tentang minat masyarakat asli Papua pada budidaya padi. Namun bila tiga argumen di atas benar, pengembangan padi memperoleh dukungan sosial yang luas.

Sekalipun demikian, kebijakan pengembangan padi di Merauke tetap perlu secara cermat memperhatikan berbagai hal di luar aspek ekonomis sesaat serta aspek agronomis yang memang amat memungkinkan. Pembangunan pertanian tanaman pangan tidak pernah terjadi dalam ruang hampa, melainkan saling memengaruhi dengan sektor dan subsektor pembangunan lain.

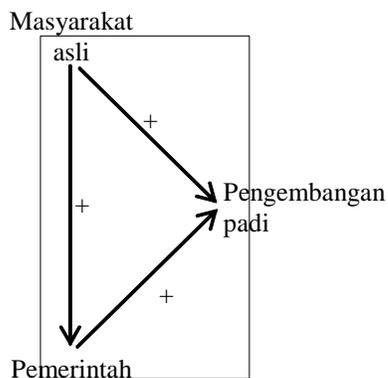
Pemerintah akan tetap perlu menghindarkan pelemahan diversifikasi pangan, marginalisasi budaya asli, serta konsentrasi ekonomi pertanian Merauke pada padi. Aspek-aspek yang juga perlu mendapat perhatian antara lain sumberdaya manusia, penyuluhan, prasarana, sistem tata niaga, dsb.

Pengembangan Pangan/Pertanian Tradisional

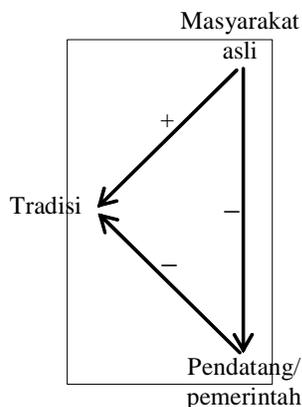
Peta 7 dapat diterjemahkan ke dalam peta persepsi masyarakat asli tentang padi dan pemerintah, menjadi Peta 8, dimana semua hubungan yang ada positif, kondusif. Tetapi kedua peta itu sebenarnya memperlihatkan persepsi jangka pendek sesaat yang dikaitkan hanya dengan aspek ekonomi. Peta itu belum menggambarkan status tradisi, identitas budaya asli, secara total.

Dalam jangka panjang, masyarakat asli mungkin akan menyadari dan menyesalkan bahwa pengembangan padi tanpa pengembangan komoditas tradisional berarti perusakan identitas budaya asli. Akibatnya, antipati pada pendatang dan gugatan pada pemerintah, seperti digambarkan Peta 2, akan kembali muncul (Peta 9).

Cepatnya dekadensi identitas budaya asli serta penurunan daya saing komparatif pertanian setempat dapat timbul akibat mobilisasi dan kulturasi besar-besaran masyarakat asli pada budidaya padi. Menurut pengamatan Djuweng (1996), alih-alih menyejahterakan, program pembangunan masif yang terlalu berorientasi ekonomis biasanya secara budaya mendominasi dan secara ekonomi eksploitatif bagi masyarakat adat.



Peta 8. Persepsi hipotetis masyarakat asli pada awal masa pengembangan padi.



Peta 9. Persepsi hipotetis masyarakat asli tentang tradisi dan pemerintah setelah mereka menyadari terbaikannya komoditas tradisional.

Saat ini sebagian masyarakat asli sudah khawatir akan terganggunya dusun sagu mereka akibat drainase persawahan di musim hujan di wilayah transmigrasi yang bersebelahan. Sagu merupakan tanaman yang secara berkala dan alamiah memerlukan genangan air. Isunya di sini bukan cukup atau tidaknya produksi sagu untuk memenuhi kebutuhan domestik, melainkan persepsi akan ada atau tidaknya perhatian dan penghormatan yang adil dari pemerintah pada identitas budaya asli. Bagi orang Papua, lahan/*dusun* merupakan sesuatu yang berharga tidak hanya karena nilai ekonominya, tetapi terutama karena nilai spiritualnya (Solossa 2005).¹⁰

Beberapa tokoh adat telah/sedang melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang secara tradisional dianggap sakral. Pembukaan dan alih fungsi wilayah-wilayah itu mungkin tidak akan berdampak buruk langsung secara ekonomis, tetapi akan sangat mengganggu harga diri masyarakat asli karena dipandang sebagai pelecehan identitas budaya mereka. Tradisi merupakan pegangan hidup masyarakat yang bersangkutan dan mempunyai logikanya sendiri; tetapi pembangunan nasional kerap keliru secara sefihak mengabaikan dan menyingkirkan budaya asli (Zakaria 1996).

Dirusaknya beberapa pintu air yang telah dibangun untuk persawahan di wilayah transmigrasi, secara sepintas dapat terlihat sebagai sabotase tidak rasional anti pembangunan anggota masyarakat asli. Tetapi bila diamati secara lebih jernih, gejala itu bisa merupakan ekspresi kecemburuan masyarakat asli akan pembangunan sawah untuk padi, komoditas yang lebih dikuasai kaum pendatang.

Antisipasi dan semua gejala tersebut diatas memperkuat saran agar pemerintah juga menghargai dan mengembangkan komoditas tradisional (tradisi) setara dengan pengembangan padi dan komoditas introduksi lain (modernitas). Selain untuk memelihara identitas budaya asli, secara ekonomis hal itu pun perlu bagi penguatan ketahanan pangan dan daya saing produk pertanian spesifik Merauke.

Kebijakan itu pada awalnya akan secara nisbi menyerap lebih banyak sumber daya pembangunan, tergantung skala pengembangannya; tetapi dalam jangka menengah dan panjang sangat membantu pencapaian kondisi ideal (lihat Peta 6) dan akan sangat menguntungkan secara ekonomi, budaya, dan politik.

Dengan demikian, pembangunan di suatu wilayah yang khas seperti Merauke sepatutnya tidak dilandaskan hanya atas nilai-nilai budaya nasional yang dominan, melainkan juga dengan mempertimbangkan tradisi penduduk aslinya. Wospakrik (2002) berpendapat bahwa pembangunan Papua sebaiknya

¹⁰ Hal senada juga disampaikan oleh Albert Gebze Muyuend, dari Lembaga Masyarakat Adat Merauke dalam wawancara 06 Juni 2006 malam.

dilakukan melalui dialog yang terus menerus dan dalam suasana saling menghargai tanpa mengabaikan hak-hak dasar orang Papua.

Kebijakan pemerintah haruslah menempatkan manusia sebagai subyek, bukan obyek, dari pertumbuhan teknologi, infrastruktur, atau aspek pembangunan lain apapun. Lee (1960) mengingatkan bahwa kita tidak pernah benar-benar memahami suatu masyarakat sampai kita benar-benar mempertimbangkan segala sesuatu dari sudut pandang mereka¹¹.

Kearifan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke untuk mengutamakan budaya asli dalam setiap program pembangunannya (Kabupaten Merauke 2006) merupakan sesuatu yang positif dan layak mendapat pujian.

Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah tenaga kerja serta belum sesuainya karakter¹² sumberdaya manusia asli Papua merupakan faktor-faktor penting yang harus diperhitungkan dan ditangani dalam pengembangan padi di Merauke. Jalan yang mudah untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia dengan keterampilan yang memadai adalah transmigrasi dari daerah-daerah lain. Tetapi langkah itu akan semakin meminggirkan penduduk asli serta memperkuat kecemburuan sosial yang akan lebih memberikan masalah daripada solusi.

Pendekatan lebih arif adalah pengembangan karakter masyarakat asli agar lebih sesuai bagi pengembangan padi di Merauke. Karakter di sini khususnya berkaitan dengan pengalaman, keterampilan, dan budaya. Tetapi pengembangan karakter itu sendiri menghadapi dua hambatan budaya¹³.

Yang pertama adalah hambatan intrinsik individu. Dengan alam yang begitu murah, orang asli umumnya terbiasa hidup tradisional berkecukupan. Sumber pangan yang melimpah di alam sekitar belum pernah membuat mereka merasa kekurangan. Setiap individu seakan tidak mempunyai alasan yang cukup untuk belajar dan bekerja lebih keras. Dibanding di daerah-daerah lain,

¹¹ Harper Lee (1960) dalam novelnya, *To Kill A Mocking Bird*, "You never really understand a person until you consider things from his point of view."

¹² Istilah "mutu" sumberdaya manusia yang digunakan dalam banyak tulisan/laporan lain secara implisit cenderung merendahkan martabat karakter manusia yang dibentuk oleh berbagai kondisi lingkungan di luar kendali individu-individu ybs. Yang sebenarnya terjadi adalah ketidak-sesuaian pengelolaan sumberdaya manusia, yang masing-masing memiliki (potensi) karakter unggul spesifik, pada perkembangan potensi lingkungan lokal dan global.

¹³ Budaya dalam hal ini adalah nilai-nilai yang dianut secara kolektif serta dibentuk oleh lingkungan, pengalaman, dan transaksi sosial yang panjang.

pendidikan/penyuluhan berpola standar nasional saat ini umumnya lebih sulit mengubah afeksi petani asli. Bila tidak difahami, hambatan intrinsik ini dapat disalah-artikan sebagai *kebodohan*.

Yang kedua adalah hambatan ekstrinsik individu, atau hambatan intrinsik kelompok. Persaingan yang terus menerus dan keras antar kelompok di masa lalu membentuk solidaritas yang sangat kuat dalam kelompok, karena hanya dengan begitu setiap kelompok dapat bertahan. Hingga sekarang, loyalitas pada kelompok masih merupakan karakter yang menonjol dari setiap orang asli Papua umumnya. Temuan Malik *et al.* (2005) juga mencerminkan adanya eksklusivisme dampak penyuluhan antar marga.

Pada umumnya orang asli Papua tidak mudah mengubah perilaku aktual tanpa dukungan kelompoknya atau bahkan restu tetua adatnya. Bila tidak difahami, hambatan ekstrinsik individu yang dapat mempersulit perubahan perilaku nyata masyarakat asli ini, dapat disalah-tafsirkan sebagai *kemalasan*.

Jadi, pengembangan padi di Merauke memerlukan sistem penyuluhan yang spesifik untuk meningkatkan kesesuaian karakter sumber daya manusia aslinya. Penyuluhan itu harus mengatasi hambatan intrinsik dan ekstrinsik individu melalui penggeseran budaya (inkulturasi) (bukan akulturasi, penggantian budaya).

Sistem Penyuluhan Pertanian Spesifik

Bagi pengembangan padi di Merauke, jumlah dan kesesuaian karakter sumber daya manusia yang terlibat dalam sistem produksi padi perlu ditingkatkan secara optimal. Pengembangan sistem penyuluhan menjadi keharusan.

Dengan asumsi tidak ada masalah berarti dengan karakter para petani transmigran, masalah sumberdaya manusia lebih pada penyesuaian karakter masyarakat asli yang memang harus dilibatkan dan diberdayakan. Masalah itu bersifat kompleks dan halus (*subtle*), banyak hal kritis hanya tampak bagi mereka dengan pengalaman, pemahaman, dan intuisi yang tajam tentang budaya asli. Penyuluhan pembangunan selama ini umumnya belum memberi perhatian yang cukup pada perubahan dalam struktur sosial atau cara hidup masyarakat (Ban & Hawkins 1999).

Ini tidak berarti bahwa penyuluhan dapat meninggalkan para petani transmigran yang telah lebih terampil membudidayakan padi, melainkan bahwa masyarakat asli layak mendapat perhatian lebih. Penyuluhan pertanian di Merauke perlu spesifik, sistematis, terencana, sekaligus lentur dan terus-menerus melibatkan para tokoh adat. Pendekatan penyuluhan yang efektif di tempat-tempat lain tidak dapat diduplikasi begitu saja dan diharapkan memberikan efektivitas yang sama di Merauke.

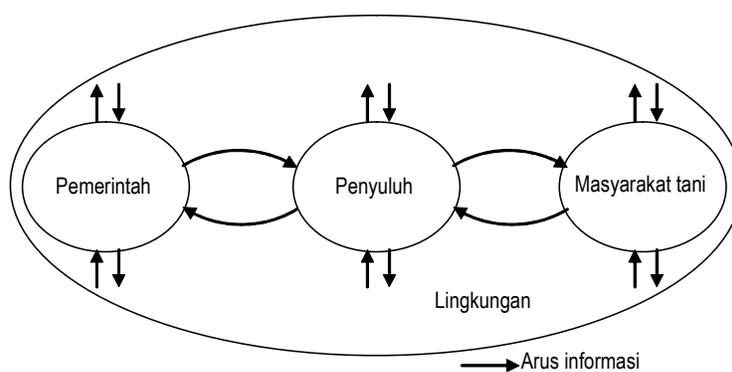
Penyuluhan pertanian sepatutnya ada dalam konteks pembangunan secara menyeluruh, tidak sekedar sebagai alat bantu peningkatan produksi pertanian semata. Dua tujuan yang layak dipertimbangkan bagi sistem penyuluhan pertanian di tengah masyarakat asli Merauke adalah penyadaran dan pemberdayaan.

Penyadaran terutama diarahkan untuk memperbaiki pengetahuan dan pemahaman tentang status diri di tengah berbagai tantangan dan peluang yang ada serta kemampuan memilih tujuan dan cara pengembangan diri. Sedangkan *pemberdayaan* lebih untuk memperbaiki keterampilan melaksanakan keputusan dan mencapai tujuan melalui cara yang telah mereka pilih.

Dalam konteks pengembangan komoditas tradisional, masyarakat asli akan memerlukan penyadaran dan pemberdayaan untuk menggeser nilai-nilai adat guna memperluas peluang modernisasi berbagai komoditas itu.

Dengan kondisi yang dinamis dan beragam, sistem penyuluhan perlu memakai pendekatan partisipatif dan difungsikan sebagai jembatan dua-arah antara masyarakat tani serta pemerintah dan berbagai pihak lain (Gambar 1). Masyarakat tani dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dari masyarakat adat. Sedangkan pemerintah juga meliputi lembaga-lembaga penelitiannya.

Penyuluhan partisipatif berciri kemitraan, menempatkan petani sebagai subyek pembangunan yang ikut memegang kendali nasibnya sendiri. Penyuluhan partisipatif adalah juga alat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pembangunan, bukan sekedar corong untuk menyampaikan, apalagi memaksakan, program pemerintah secara kaku kepada masyarakat. Para penyuluhnya akan dituntut menjadi katalisator kesaling-mengertian antara petani, terutama dari masyarakat asli, dengan berbagai pihak lain, terutama pemerintah.



Gambar 1. Model sederhana penyuluhan partisipatif.

Merauke terdiri dari 160 desa (Bappeda & BPS Merauke. 2005). Bila setiap desa rata-rata memerlukan satu orang penyuluh, maka Merauke akan memerlukan 160 orang penyuluh. Masing-masing perlu menguasai ilmu dan keterampilan yang relevan, serta dapat diterima oleh masyarakat binaannya. Untuk membina masyarakat asli Merauke, setiap penyuluh selanjutnya memiliki daya adaptasi, dedikasi, dan kreativitas yang tinggi.

Daya adaptasi berguna dalam penyesuaian pendekatan dan materi penyuluhan. Lebih dari itu, daya adaptasi membantu penyuluh ybs. untuk betah tinggal di tengah masyarakat yang dilayaninya. Dedikasi diperlukan agar penyuluh ybs. lebih berorientasi pencapaian tujuan daripada sekedar penyelesaian tugas rutin. Kreativitas akan bermanfaat dalam menghadapi situasi yang amat beragam dan dinamis di tengah pembangunan masyarakat asli Merauke.

Masalahnya kemudian adalah bagaimana mendapatkan begitu banyak penyuluh dengan karakter yang ketat seperti disebutkan diatas? Salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan adalah para pemuda (asli maupun pendatang) lulusan sekolah atau perguruan tinggi pertanian, yang terpilih. Untuk suatu periode awal (misal 1-2 tahun pertama), masing-masing disertai seorang petani berpengalaman praktis, misalnya petani muda dari daerah transmigrasi. Di desa pengembangan, setiap penyuluh muda masih didampingi tetua setempat.

Para penyuluh itu layak mendapatkan imbalan dan insentif yang sebanding dengan keunggulan kualifikasinya. Namun pembebasan mereka yang tidak mampu memelihara kualifikasi standar harus pula dimungkinkan. Tak kalah penting adalah pembangunan sistem komunikasi bagi para penyuluh dan petani untuk lancar mengakses dan menyampaikan informasi yang perlu.

Pembangunan sistem penyuluhan pertanian Merauke akan membutuhkan perencanaan sungguh-sungguh dan investasi yang besar.

Pengembangan Sektor-Sektor Lain

Untuk ekstensifikasi sistem produksi padi dengan tenaga kerja terbatas, modal besar dibutuhkan untuk pengadaan peralatan dan mesin-mesin yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas usahatani.

Pembangunan sektor pertanian saling mempengaruhi dengan berbagai sektor pembangunan lain. Misalnya industri pengolahan akan perlu dibangun. Siswono (2004) berpendapat bahwa perbaikan produktivitas dan mutu produk pertanian nasional dapat ditempuh hanya melalui teknologi maju, mekanisasi pertanian, serta efisiensi penggunaan sarana produksi. Baginya, pascapanen perlu ditangani dengan baik di tingkat petani sehingga petani dapat menjual produk akhir yang bernilai lebih tinggi daripada bahan mentah.

Salah satu kelemahan fisik internal pengembangan padi di Merauke adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, misalnya fasilitas pasca panen, penyimpanan, transportasi, dsb. Hal tersebut berdampak pada keberdayaan sistem tata niaga dalam memberikan keuntungan kepada petani. Untuk dapat dikembangkan, komoditas tradisional memerlukan perbaikan nilai pasar. Itu dapat dicapai melalui penelitian dan pengembangan yang menghasilkan berbagai inovasi yang relevan, penggeseran nilai-nilai adat, sekaligus penyadaran masyarakat luas akan tingginya nilai komoditas tradisional itu sendiri.

Musim kemarau dan musim hujan yang tegas (Kabupaten Merauke 2006) berimplikasi pada kekeringan dan banjir berkala. Sarana pengelolaan air sangat perlu dibangun bagi pengembangan padi di wilayah yang luas dan datar ini. Sekitar 80% wilayah Merauke (36.000 km²) mempunyai kemiringan maksimum 8% (Kabupaten Merauke 2006). Beberapa daerah diketahui mempunyai masalah tanah, tetapi luasan lahan-lahan itu tidak signifikan dibanding dominasi lahan yang secara biofisik sangat sesuai untuk budidaya padi.

Kesimpulan

Padi layak dikembangkan secara optimal di Merauke dengan memperhatikan budaya asli. Berbagai komoditas tradisional dan komoditas berpotensi lain perlu ikut dikembangkan secara seimbang.

Untuk pengembangan daya saing masyarakat asli, mendatangkan tenaga terampil dari luar Merauke untuk sementara sebaiknya dihindarkan.

Sistem penyuluhan yang besar, sistematis, dan terencana diperlukan terutama untuk kulturasi masyarakat asli pada budi daya padi. Penyuluhan harus berfungsi sebagai jembatan informasi dua-arah, sebagai katalisator kesaling-mengertian antara masyarakat tani dan, khususnya, pemerintah.

Sejumlah besar penyuluh bermutu tinggi akan diperlukan. Disamping untuk meningkatkan produktivitas petani padi yang telah ada, penyuluhan harus mampu menyadarkan dan memberdayakan masyarakat asli. Di fihak lain, sosialisasi diperlukan masyarakat pendatang untuk lebih memahami dan menghargai budaya asli.

Berbagai sektor dan subsektor lain harus dikembangkan secara simultan, seperti sarana transportasi, sistem tata niaga, industri pasca panen, dsb.

Pustaka

- Ban, A.W. van den & H.S. Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius, Yogyakarta. (Diterjemahkan dari *Agricultural Extension, 2nd edn.*, 1996, Blackwell Science, Oxford)
- Bappeda & BPS Merauke. 2005. *Merauke Dalam Angka 2000-2004*.
- Djuweng, S. 1996. Orang Dayak, Pembangunan dan Agama Resmi. *In: Kisah Dari Kampung Halaman: masyarakat suku, agama resmi dan pembangunan*. Interfidei, Yogyakarta. p.3-36.
- Festinger, L. 1957. *A Theory of Cognitive Dissonance*. Standford University, Standford.
- Giay, B. 1996. Masyarakat Amungme (Irian Jaya), Modernisasi dan Agama Resmi: sebuah model pertemuan. *In: Kisah Dari Kampung Halaman: masyarakat suku, agama resmi dan pembangunan*. Interfidei, Yogyakarta. p.37-53.
- Howai, M. 2004. Kebijakan Pembangunan Pertanian Papua. *In: J. Limbongan; Y. Sujitno; N.E. Lewaherilla; A. Malik; M. Nggobe (eds)*, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua, Jayapura, 5-6 Oktober 2004. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. p.1-5.
- Kabupaten Merauke. 2006. *Usulan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Merauke. (tidak dipublikasikan)*
- Makarim, A.K.; M.O. Adnyana; A. Widjono; A. Hasanuddin; D. Pasaribu. 2006. *Studi Kelayakan Pengembangan Teknologi Padi di Merauke, Papua. Laporan Tengah Tahun. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor. (tidak dipublikasikan)*
- Malik, A.; R. Hendayana; S.R. Sihombing; D. Wamaer; Atekan; Usman; A. Hanafiah; A. Kasim; M. Ondikelew; J. Limbongan. 2005. *Laporan Akhir Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian wilayah Papua: kajian pemilihan model penyuluhan pertanian bagi penduduk asli Merauke*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian – Papua, Jayapura. *(tidak dipublikasikan)*
- Muhamad, I. 2002. Kebijakanaksanaan Bimas dan Ketahanan Pangan di Provinsi Papua. *In: Manikmas, M.O.A.; A. Sudrajat; M.Z. Kanro; R. Hendayana (eds.)*, Prosiding Seminar Regional Peran Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Mendukung Ketahanan Pangan & Agribisnis Pada Era Otonomi Khusus Papua. Papua, 7-8 Januari 2002. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. p.1-5.

- Raweyai, Y.T. 2002. Mengapa Papua Ingin Merdeka. Presidium Dewan Papua, Jayapura.
- Severin, W.J. & J.W. Tankard. 2001. Teori Komunikasi: sejarah, metode, dan terapan di dalam media massa, *edisi kelima*. (alih bahasa dari *Communication Theories: origins, methods, & uses in the mass media*). Prenada, Jakarta.
- Siahaan, B. 2006. Separatism in Papua: Perceptions or misperceptions on Papuans. Opinion and Editorial, The Jakarta Post, February 1, 2006. (http://www.melanesianews.org/spm/publish/article_1703.shtml)
- Siswono Y.H. 2004. Membangun Kemandirian Pangan: suatu kebutuhan bagi Indonesia, negara berpenduduk banyak dengan potensi pangan yang besar. Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.
- Solossa, J.P. 2005. Otonomi Khusus Papua: mengangkat martabat rakyat Papua di dalam NKRI. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Wospakrik, F.A. 2002. Kearifan Mencari Solusi Persoalan Papua. *In*: Y.T. Raweyai, Mengapa Papua Ingin Merdeka. Presidium Dewan Papua, Jayapura. p.v-vi.
- Zakaria, R.Y. 1996. Pembangunan yang Melumpuhkan: pelajaran dari Kepulauan Mentawai. *In*: Kisah Dari Kampung Halaman: masyarakat suku, agama resmi dan pembangunan. Interfidei, Yogyakarta. p.85-119.